

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

Jusuf Irianto

Gitadi Tegass S.

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
Surabaya, 5 Juni 2012

AKTIVITAS DAN ELEMEN DLM. POLICY MAKING

AKTIVITAS

DISIPLIN RISET

(Policy Science)

POLICY ANALISIS

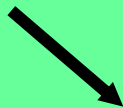
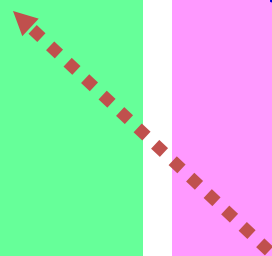
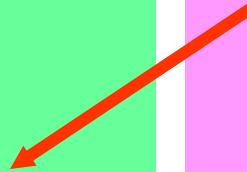
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN &
IMPLEMENTASI

ELEMEN UTAMA

RASIONALITAS ANALITIK

KONFLIK NILAI &
RESOLUSI

FAKTOR2 BIROKRATIK



Elemen penting yang harus terkandung dalam sebuah kebijakan

- 1. Tujuan kebijakan (*the goals of the policy*)**
- 2. Sebab akibat (*the causal model*)**
- 3. Instrumen kebijakan (*the tools of the policy*)**
- 4. Sasaran kebijakan (*the targets of the policy*)**
- 5. Implementasi kebijakan.**

Kebijakan dan Pelayanan Publik

PUBLIC POLICY

1. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan refleksi dari relasi antara wakil dan terwakil
2. Terwakil memilih para wakil untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah bersama
3. Kebijakan publik merupakan bentuk kegiatan untuk menyelesaikan masalah bersama; untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

SERVICE PROVIDER

1. Pelayanan oleh negara (instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah) kepada masyarakat (Warga Negara)
2. Pelayanan yang diberikan oleh swasta kepada masyarakat sebagai *customer*.
Pengertian kedua ini seringkali tidak dikategorikan sebagai pelayanan publik, tetapi dimaknai sebagai pelayanan pada sektor swasta.

PELAYANAN PUBLIK & PRIVAT

1) PUBLIK

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,
- b. Memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani (*wide stakeholders*)
- c. Memiliki tujuan sosial
- d. Dituntut akuntabel pada publik
- e. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan (*complex and debated performance indicators*)
- f. Seringkali menjadi sasaran isu politik

1) PRIVAT

- a. Didasarkan pada kebijakan Dewan Direksi (*board of directors*)
- b. Terfokus pada pemegang saham (*shareholders*) dan manajemen
- c. Memiliki tujuan mencari keuntungan
- d. Harus akuntabel pada hal-hal tertentu
- e. Kinerjanya ditentukan atas dasar kinerja manajemen, termasuk di dalamnya kinerja finansial
- f. Tidak terlalu terkait dengan isu politik.

EVALUASI : PERBANDINGAN PERCEIVED & ACTUAL IMPACT

KRITERIA :

- 1. GOALS:**
PERNYATAAN LUAS & FORMAL
CAPAIAN MASA DEPAN
- 2. OBJECTIVES :**
PERNYATAAN LEBIH KONKRET &
FOKUS TENTANG TUJUAN
(dimensi:Waktu/ target)
- 3. CRITERIA :**
PERNYATAAN KHUSUS TENTANG
DIMENSI OBJECTIVES
(Biaya/manfaat/ resiko/efektifitas/
feasibilitas2/waktu/ dll)
- 4. MEASURES :**
Kriteria definisi operasional yang
tangible, kuantitatif, universal

KETERBATASAN :

- 1. TECHNICAL FEASIBILITY** (best practices)
- 2. POLITICAL VIABILITY**
(Relevansi dampak pd aktor2.)
Berupa :
Acceptability / Appropriateness
(ketepatan) / Responsiveness
(kepekaan) / Legality (dukungan hukum) / Equity (keadilan)
- 3. ECONOMIC & FINANCIAL POSSIBILITY**
- 4. ADMINISTRATIVE OPERABILITY.**
(Authority / Institutional commitment / Capability / Organizational Support)

METODE ANALISIS

1. Definisi
2. Prediksi
3. Preskripsi
4. Deskripsi
5. Evaluasi

1. Informasi tentang kondisi public problem
2. Informasi tentang konsekuensi kebijakan yang akan diambil
3. Informasi tentang nilai konsekuensi suatu alternatif
4. Informasi konsekuensi saat ini dan masa lalu
5. Manfaat alternatif kebijakan terhadap suatu problem publik

REGULATORY IMPACT ANALISIS (RIA)

1. Perumusan Masalah.
2. Identifikasi Tujuan
3. Identifikasi Alternatif Solusi
4. Cost Benefit- Analysis
5. Komunikasi dengan Stakeholder
6. Penentuan the best option
7. Perumusan Strategi Implementasi

- Risk Appraisal
 - Policy Review
- 

POLICY ANALIST

1. Kompetensi mengorganisasi informasi (terbatas) dibawah tekanan
2. Kemampuan dalam perspektif sosial
3. Ketrampilan teknis untuk memprediksi
4. Pemahaman baik tentang Perilaku politik
5. Memiliki Etika

1. **Political feasibility assesment :**
 - Identifikasi aktor pol.relevan
 - Pahami motive & beliefnya
 - Assesment Sbr dy.aktor
 - Manipulasi agar feasible secara politik
2. **Penguasaan Strategi :**
 - Kooptasi /kompromi/
 - Herestetik / Retorika

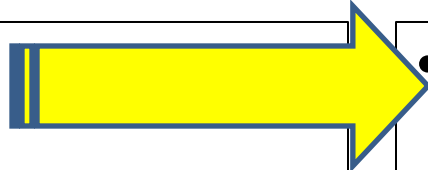
The standardized questions of the survey captured five areas common to all customer relations.

- 1. Reliability**—the ability to perform the promised service dependably and accurately.
- 2. Responsiveness**—the willingness to help customers and provide prompt service.
- 3. Empathy**—the demonstration of caring and individualized attention.
- 4. Assurance**—employees are knowledgeable and courteous and are able to convey trust and confidence.
- 5. Tangibles**—the physical appearance of facilities, equipment, people

3 VARIABEL

Stakeholders Analysis

1. POWER



- Otoritas Legal (Legal Authority)

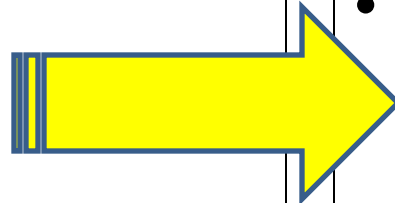
2. INTEREST



- (Quantities of Resources :

- **Human/ Financial/Political)**

3. INFLUENCE



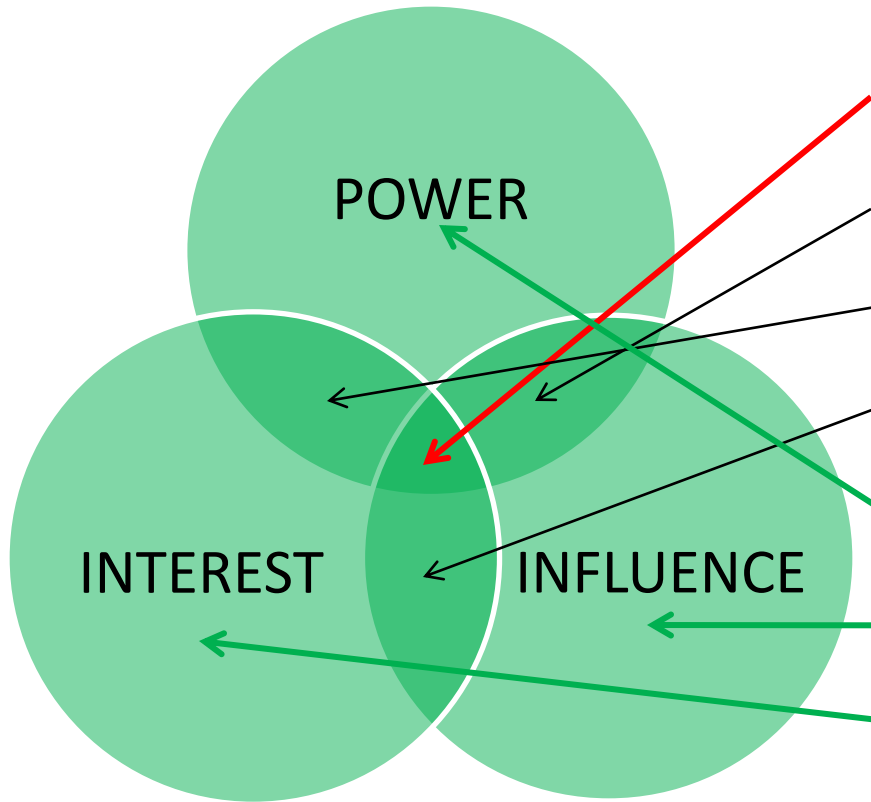
- Kepentingan/ perhatian/ ketertarikan

- (MOTIF & CONCERN)

ATTITUDE : Support.

Kemampuan mempersuasi pihak lain / menerima/ melaksanakan.

- (Sum of H/F/P)



- 1. Definitive**
2. Dominant
3. Dangerous
4. Dependent
5. Dormant
6. Discretionary
7. Demanding

Stakeholders in Health Sector

- **Government & DPRD**
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Sosial
 - RSUD
 - Komisi D DPRD
- **Intermediary Actors/Agencies**
 - K3S (Coordinator for Social Welfare Activities)
 - PSM (Social Worker)
 - Bidan
 - Doctors
 - PKK
 - Private Hospital
 - Local Strongman
- **Beneficiaries**
 - Publik
 - Bidan
 - Kader Posyandu

Health Sector Stakeholders di Kab. X

